

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Senapelan)

Rachel Alam Samudra¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: rachel12@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 5 of 2002 concerning Public Order, particularly in the context of controlling street vendors (PKL) in Senapelan District. The problem arises from the use of public spaces such as sidewalks and roads by street vendors, which causes traffic congestion, sanitation issues, and a decline in urban aesthetics. Although the Kodim Market area on Jalan Teratai has now been officially recognized as a traditional market by the Pekanbaru City Government, problems related to order and spatial arrangement persist. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include field observation, in-depth interviews with Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers and street vendors, as well as field documentation. The analysis is based on public policy implementation theory, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2002 has not been optimal. The challenges include a shortage of Satpol PP personnel, ineffective relocation sites for street vendors, weak inter-agency coordination, and inadequate dissemination of regulations to the vendors. Moreover, enforcement efforts tend to be temporary, as many street vendors return to their original locations shortly after being removed. It can be concluded that the efforts to enforce public order in Senapelan District still require stronger policy implementation, improved supervision, and cross-sectoral synergy to achieve sustainable urban order

Keywords: Policy Implementation, Public Order, Street Vendors, Regional Regulation, Satpol PP.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Senapelan. Permasalahan muncul akibat aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan penurunan estetika kota. Meski kawasan Pasar Kodim di Jalan Teratai kini telah diakui secara resmi sebagai pasar tradisional oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, permasalahan ketertiban dan penataan tetap berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP dan pedagang, serta dokumentasi di lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 belum berjalan

secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya personel Satpol PP, tidak efektifnya lokasi relokasi PKL, lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum maksimalnya sosialisasi regulasi kepada para pedagang. Selain itu, tindakan penertiban cenderung bersifat sementara dan tidak memberikan efek jangka panjang karena PKL kerap kembali ke lokasi semula. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan ketertiban umum di Kecamatan Senapelan masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaan kebijakan, peningkatan kualitas pengawasan, serta sinergi lintas sektor untuk menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Satpol PP.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Salah satu kewajiban utama adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kebijakan operasional seperti peraturan daerah (perda).

Namun, penataan ruang usaha informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) sering belum optimal. Keterbatasan akses ke sektor formal membuat PKL memanfaatkan ruang publik untuk berjualan. Akibatnya, muncul masalah kepadatan lalu lintas, penurunan kebersihan, konflik sosial, serta pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

Di Kota Pekanbaru, Jalan Teratai atau Pasar Kodim menjadi contoh kawasan PKL yang sulit ditertibkan meskipun sudah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2002. Data Satpol PP menunjukkan penertiban PKL dilakukan rutin dan intensif, tetapi hasilnya belum maksimal karena pedagang kerap kembali ke lokasi semula. Penertiban bersifat insidental, pengawasan lemah, dan sanksi belum diterapkan secara tegas.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Keterbatasan fasilitas relokasi, biaya sewa tinggi, dan minimnya minat pembeli di tempat resmi juga membuat PKL enggan pindah. Oleh karena itu, penegakan perda perlu diperkuat dengan pengawasan berkelanjutan, sanksi efektif, pembaruan regulasi, serta solusi penataan ruang usaha informal yang lebih adaptif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi

Administrasi adalah rangkaian kegiatan terencana berupa kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, mencakup penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian, serta fungsi pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan penataan dokumen; secara luas, administrasi publik berarti seluruh proses penyelenggaraan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Organisasi

Organisasi adalah wadah kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, berbagi tugas, memiliki hubungan atasan-bawahan, dan terikat secara formal untuk mencapai tujuan bersama secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan.

3. Manajemen

Manajemen adalah ilmu, seni, dan proses mengatur serta mengoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (6M: man, money, method, machine, material, market) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai melalui kerja sama terstruktur dan produktif.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan terencana yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu, bersifat simultan, nyata dilaksanakan (bukan sekadar wacana), dan dapat berupa keputusan populer maupun tidak populer, serta positif (bertindak) atau negatif (tidak bertindak). Kebijakan publik memiliki tingkatan makro, meso, dan mikro, dan dijalankan melalui tahapan saling terkait mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi.

5. Implementasi

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau peraturan oleh berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik manajerial untuk mencapai tujuan kebijakan secara nyata. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling terkait, sedangkan pendekatan terbaru menekankan bahwa proses ini juga bergantung pada dinamika politik, konteks sosial, jaringan aktor, dan ideologi yang berkembang.

Dalam konteks lokal, implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum menghadapi tantangan seperti rendahnya kejelasan komunikasi kepada pedagang, keterbatasan sumber daya petugas, sikap pelaksana yang belum konsisten, serta prosedur birokrasi yang masih kaku. Oleh karena itu, pemilihan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dinilai tepat karena mampu memetakan faktor-faktor kunci secara komprehensif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana penertiban PKL dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan di lapangan.

METODE

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif untuk menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Senapelan. Data dikumpulkan dari dua kelompok, yaitu petugas Satpol PP yang terlibat langsung dalam penertiban PKL dan masyarakat atau PKL yang menjadi objek penertiban. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk petugas Satpol PP dan accidental sampling untuk masyarakat atau PKL. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui

kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, serta data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah, laporan Satpol PP, arsip, dan literatur pendukung. Data dianalisis secara kuantitatif-deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang memfokuskan pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan menurut teori George Edward iii, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tabel V. 1 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Senapelan)

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Komunikasi	16 (57,14%)	7 (25%)	5 (17,86%)	28 (100%)
2	sumber Daya	12 (42,86%)	13 (46,83%)	3 (10,71%)	28 (100%)
3	Disposisi	13 (46,43%)	13 (46,43%)	2 (7,14%)	28 (100%)
4	Struktur Birokrasi	12 (42,86%)	14 (50%)	2 (7,14%)	28 (100%)
Jumlah		53	47	12	84
Rata-rata		13	12	3	28
Persentase		46,43%	42,86%	10,71%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2025

Tabel V.2 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden PKL Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Senapelan)

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Komunikasi	6 (20%)	20 (66,67%)	4 (13,33%)	30 (100%)
2	sumber Daya	2 (6,67%)	19 (63,33%)	9 (30%)	30 (100%)
3	Disposisi	4 (13,33%)	22 (73,33%)	4 (13,33%)	30 (100%)
4	Struktur Birokrasi	6 (20%)	16 (53,33%)	8 (26,67%)	30 (100%)
Jumlah		18	77	25	120
Rata-rata		5	19	6	30
Persentase		16,67%	63,33%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dari pegawai Satpol PP Kota Pekanbaru dan pedagang kaki lima (PKL) terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Senapelan), dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan empat variabel dari model implementasi George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil gabungan ini memberikan pandangan bagaimana kebijakan ini dijalankan serta dirasakan manfaat dan tantangannya oleh dua pihak utama: pelaksana kebijakan dan masyarakat terdampak.

Pada aspek komunikasi, para pegawai menilai bahwa informasi terkait prosedur penertiban sudah cukup jelas dan dipahami di internal Satpol PP. Namun dari sisi PKL, masih ada keluhan terkait sosialisasi yang dinilai belum sepenuhnya merata, sehingga sebagian pedagang merasa kurang memahami alur penertiban maupun alternatif solusi yang disediakan

pemerintah. Ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi perlu diperkuat agar kebijakan dapat diterima dengan baik.

Pada aspek sumber daya, pegawai melihat dukungan sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di pihak PKL, persepsi berbeda muncul karena mereka masih merasa belum ada dukungan nyata berupa penataan lokasi yang layak atau pendampingan setelah penertiban dilakukan. Hal ini menjadi catatan agar sumber daya penertiban dapat diarahkan lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

Pada aspek disposisi, pegawai memandang sikap pelaksana Satpol PP cukup konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan peraturan. Namun di lapangan, PKL masih menilai penertiban terkadang dilakukan secara mendadak dan kurang melibatkan pendekatan persuasif, sehingga menimbulkan penolakan. Ini menegaskan perlunya peningkatan sikap humanis dari pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan cara yang lebih diterima.

Pada aspek struktur birokrasi, pegawai menilai alur kerja dan SOP sudah ada dan diterapkan, tetapi dari sudut pandang PKL masih ditemukan kendala di lapangan seperti penataan kewenangan antar pihak yang belum sinkron. Hal ini dapat memunculkan tumpang tindih penanganan dan kebingungan di lapangan, sehingga perlu evaluasi mekanisme kerja birokrasi agar pelaksanaan penertiban lebih terarah.

Secara keseluruhan, hasil penilaian gabungan ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL di Kecamatan Senapelan telah berjalan sesuai peraturan, namun masih terdapat beberapa hambatan pada aspek komunikasi, dukungan sumber daya, pendekatan sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan ini menjadi dasar penting untuk perbaikan agar penertiban dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan diterima oleh semua pihak terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara, observasi, serta analisis data kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, tergolong "Cukup Terlaksana".

Penilaian ini didasarkan pada empat indikator implementasi menurut Edward III:

1 Komunikasi

Proses penyampaian informasi kebijakan kepada pedagang belum berjalan maksimal. Sosialisasi yang kurang merata menyebabkan sebagian besar PKL tidak memahami isi perda secara utuh, sedangkan koordinasi antarinstansi pelaksana juga belum optimal.

2 Sumber Daya

Keterbatasan jumlah personel, sarana pendukung, dan alokasi anggaran menyebabkan kegiatan penertiban belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, belum tersedia alternatif yang layak bagi PKL pasca penertiban

3 Disposisi

Komitmen petugas dalam melaksanakan penertiban cukup baik, tetapi pendekatan yang digunakan masih bersifat represif dan kurang komunikatif. Hal ini menimbulkan resistensi dari PKL yang merasa tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi kebijakan.

4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan perda masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal prosedur yang belum sistematis serta minimnya koordinasi yang terencana. SOP pelaksanaan belum sepenuhnya menjadi pedoman teknis yang konsisten di lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan sudah mulai dijalankan oleh Satpol PP, namun masih diperlukan perbaikan di berbagai aspek agar implementasinya dapat berjalan secara efektif, komunikatif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi para PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Ali, M. (2007). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: CV Bumi Aksara.

Ali, M. (2015). *Teori dan proses kebijakan publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andry, F., & Yussa, R. (2020). *Administrasi publik dan kebijakan*. Bandung: CV

Widina Media Utama.

Anggara, S. (2012). *Administrasi publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Baidowi, A. (2021). *Implementasi kebijakan publik: Pendekatan Edward III dalam tata kelola pemerintahan*. Surabaya: Laksana Media.

Cairney, P. (2019). *Understanding public policy: Theories and issues (2nd ed.)*. London: Red Globe Press.

Devi, M. (2018). *Manajemen sumber daya manusia modern*. Yogyakarta: Deepublish.

Donni, V. (2014). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Bandung: Alfabeta.

- Dunn, W. N. (dalam Ali, M., 2007). Public policy analysis: An introduction (Teori dalam buku Ali). Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Dye, T. R. (dalam Ali, M., 2007). Understanding public policy (Teori dalam buku Ali). Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Gibson, J. L. (1996). Organizations: Behavior, structure, processes (9th ed.). Boston: Irwin.
- Gie, T. L. (2012). Administrasi perkantoran modern. Yogyakarta: Liberty.
- Handoko, T. H. (2012). Manajemen (2nd ed.). Yogyakarta: BPF.
- Hardiyansyah. (2017). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, K. (2016). Dasar-dasar administrasi dan manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indrawijaya, R. (2009). Dasar-dasar organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irra, Y. (2011). Administrasi perkantoran. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartono, K. (2016). Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah kepemimpinan abnormal itu? Jakarta: Rajawali Pers.
- Maksudi, B. I. (2017). Dasar-dasar administrasi publik. Jakarta: Kencana.
- Maksudi, B. I. (2017). Teori organisasi modern. Jakarta: Kencana.
- Manullang, M. (2009). Dasar-dasar manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Medrilzam, M., Syahriyanti, F., & Munoz, D. C. (2019). Kota untuk semua: Narasi dan dinamika perencanaan kota di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Nugroho, R. (dalam Ali, M., 2015). Public policy: Teori dan implementasi kebijakan publik (Teori dalam buku Ali). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolog, Y. (2020). Manajemen administrasi publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, H. (2013). Metodologi Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ripley, R. B. (dalam Ali, M., 2007). Policy analysis in political science (Teori dalam buku Ali). Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Sadaryamanti. (2014). Manajemen strategik dan operasional. Surabaya: Media Discourse.
- Siagian, S. P. (2008). Teori dan filsafat administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2011). Administrasi publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2011). Filsafat administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto, S. (2013). Pengantar manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, A. (2012). Studi administrasi publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsudin, S. I. (2016). Pengantar administrasi publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, A. (2015). Analisis kebijakan publik: Teori dan praktik. Bandung: Citapustaka Media.
- Terry, G. R. (2014). Prinsip-prinsip manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wanardi, W. (2009). *Perilaku organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). New York: Routledge.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zulkifli, M., & Yogya, H. (2014). *Fungsi-fungsi manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.

- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Sisi Lain Realita, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Asketik, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. Sisi Lain Realita, 4(1), 90-102.

- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogya, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau

- Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.

- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Sisi Lain Realita, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Asketik, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. Sisi Lain Realita, 4(1), 90-102.

- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogya, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau

Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Regulasi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru